

# ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH, DAN TINGGI DI INDONESIA \*

Oleh  
Rochmat Wahab

## A. Pengantar

Dua persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Pertama, secara internal, bangsa Indonesia menghadapi krisis multidimensional, persatuan bangsa yang merenggang, demokratisasi pada semua aspek kehidupan, desentralisasi manajemen pemerintahan, dan kualitas pendidikan belum menunjukkan kemampuan kompetitif. Kedua, secara eksternal, bangsa Indonesia menghadapi tantangan pasar global, kemajuan teknologi yang menuntut pendidikan kompetitif dan inovatif, dan *networking* tanpa batas.

Untuk bangsa Indonesia dapat survival, bahkan dapat tampil secara berarti dalam percaturan di tengah-tengah masyarakat dunia, kondisi tersebut di atas tidak harus dihindari, melainkan wajib dihadapi dengan semangat dan kemampuan yang tinggi oleh setiap warga dan segenap bangsa Indonesia. Upaya yang sangat strategi untuk menghadapinya adalah memantapkan sistem pendidikan nasional, dan menjamin terselenggaranya pendidikan nasional yang bertanggung jawab.

Jika upaya pembenahan sistem pendidikan nasional dapat dilakukan secara sungguh-sungguh, maka diharapkan bangsa Indonesia mampu mengangkat martabat bangsa dan negara.

## B. Isu-isu strategis

1. Belum meratanya kesempatan pendidikan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Kondisi geografis, sosial, dan budaya bangsa Indonesia yang sangat heterogin berkonsekuensi langsung terhadap ragamnya kondisi warga Indonesia. Ada yang mudah mengakses pendidikan, sebaliknya sangat banyak yang mengalami mengakses pendidikan disebabkan berbagai kendala yang dihadapinya. Kondisi yang demikianlah yang membuat pemerataan pendidikan sembilan tahun belum dapat dituntaskan, terlebih-lebih dikaitkan dengan pemerataan mutunya.

2. Kualitas lulusan pendidikan masih belum membanggakan pada semua jenjang.

Pembangunan sektor pendidikan telah diupayakan dari tahun ke tahun,

---

*\*Disampaikan dan dibahas dalam Sarasehan Hizbut Tahrir Indonesia: Membangun Generasi Cerdas, Generasi Peduli Bangsa, pada tanggal 25 Juli 2004 di Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta.*

sehingga tidak sedikit masyarakat yang illiterate sudah dapat dientaskan. Namun masih saja kualitas pendidikan secara nasional belum dapat membanggakan, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

3. Rendahnya kesiapan lulusan dalam memasuki kelanjutan studi dan kehidupan di masyarakat. Sudah sangat banyak lulusan pendidikan pada semua jenjang telah dihasilkan, namun mereka tidak sepenuhnya memiliki kesiapan yang memadai, sehingga dapatlah dipahami manakala masih banyak lulusan yang merasa kesulitan dalam merebut peluang kerja, apalagi mengembangkan lapangan kerja sendiri.
4. Lemahnya kinerja lembaga pendidikan pada semua jenjang. Manajemen pendidikan telah diupayakan dibenahi, baik infra struktur maupun sistem, implementasi, dan evaluasinya. Namun masih sangat banyak lembaga pendidikan yang belum memiliki kemandirian dalam mengelola pendidikan secara produktif.

### **C. Arah Kebijakan Pendidikan**

#### **1. Pemberdayaan Lembaga Pendidikan.**

Kebijakan pendidikan nasional pada semua jenjang baik kini maupun ke depan terutama telah diarahkan kepada pemberdayaan lembaga pendidikan, sehingga memiliki otonomi yang tinggi dalam menghadapi setiap persoalan yang dihadapi. Pemberdayaan lembaga pendidikan ini lebih didasarkan pada pemberian trust kepada lembaga untuk mengelola dirinya sendiri secara bertanggung jawab.

#### **2. Desentralisasi Pendidikan**

Keragaman yang dimiliki oleh lembaga pendidikan baik dilihat dari jenis dan njenjangnya tidaklah relevan lagi jika semua pengelolaan pendidikan disentralkan, sebagaimana pada era-era sebelumnya. Desentralisasi pendidikan diharapkan dapat mewujudkan setiap program dan pelaksanaannya sesuai dengan kondisi masing-masing, sehingga dapat dijamin efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

#### **3. Akuntabilitas Pendidikan.**

Institusi dan sumber daya pendidikan dalam menunjukkan kegiatannya sering kali lepas dari tanggung jawabnya. Untuk dapat lebih dipertanggungjawabkan kepada public, maka setiap institusi seharusnya mampu menunjukkan kinerjanya secara bertanggung jawab sebagaimana amanat yang telah diberikan. Kegiatan pendidikan tidak hanya menghabiskan biaya yang telah disepakati, namun sejauh mana dapat diwujudkan dalam kegiatan yang bermakna.

#### **4. Relevansi Pendidikan**

Program pendidikan dan kurikulum telah dilakukan perbaikan secara terus menerus yang diharapkan dapat menyiapkan lulusan memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan pada jamannya. Namun lepas dari itu tetap berbagai

kegiatan yang diciptakan perlu dirahkan juga untuk membekali peserta didik dalam menghadapi kebutuhan dalam hidupnya.

#### 5. Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat merupakan stakeholder utama dalam proses pendidikan. Oleh karena di samping pemerintah memenuhi tanggung jawabnya untuk mendukung terjadinya proses pendidikan, masyarakat perlu diberdayakan untuk berpartisipasi, baik secara finansial maupun substantive, sehingga mereka ikut memiliki tanggung jawab dalam mengawal proses pendidikan yang ada di sekitarnya.

#### D. Strategi Pendidikan Nasional.

Untuk mewujudkan kebijakan pendidikan nasional, maka ada beberapa strategi pendidikan nasional. Pertama, demokratisasi pendidikan, upaya dapat dilakukan dengan mengadakan perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, mewujudkan pendidikan untuk semua, memungkinkan terjadinya pemberdayaan dan pendayagunaan institusi masyarakat, memberikan perhatian tersendiri terhadap kelompok khusus, dan mengupayakan pendirian unit pendidikan.

Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang yang diwujudkan dengan melakukan pembaharuan kurikulum pada semua jenjang, meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan, meningkatkan kualitas proses dan evaluasi pendidikan, meningkatkan peran supervisi pendidikan, dan meningkatkan kualitas penelitian.

Ketiga, meningkatkan relevansi pendidikan yang dapat dimanifestasikan dengan pengembangan kecakapan dasar, menata program sesuai dengan kepentingan kelanjutan studi dan memasuki dunia kerja, menciptakan proses pendidikan yang manusiawi, dan membangun iklim pendidikan yang inklusif.

Terakhir, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan yang dapat diwujudkan dengan penegakan Manajemen Berbasis Sekolah dan Pendidikan berbasis masyarakat, penegakkan Otonomi dan akuntabilitas perguruan tinggi, penerapan dalam pendanaan pendidikan yang berbasis kinerja, dan pemantapan keberadaan dan fungsi akreditasi lembaga pendidikan semua jenjang, dan mengupayakan debirokratisasi pendidikan

#### E. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia, di antaranya:

##### 1. Mentalitas birokrat sektor pendidikan

Pengelolaan pendidikan tidak akan lebih produktif manakala pimpinan lebih menunjukkan penampilan birokratis, dibandingkan dengan penampilan profesional. Penampilan birokratis cenderung mengatasi persoalan pendidikan

lebih bersifat administratif dan birokratis, daripada pendekatan yang bernuansa akademik-profesional dan humanistik. Tentu saja untuk beberapa hal masih juga diperlukan pendekatan administratif.

#### 2. Politisasi birokrasi pendidikan.

Dampak negatif otonomi pendidikan memungkinkan terjadinya pembinaan karir tanpa batas, sehingga siapapun dapat mengelola birokrasi pendidikan. Jika birokrasi pendidikan dikelola dengan cara dan pendekatan seperti ini, maka pengembangan pendidikan tidak akan pernah menunjukkan kinerja yang membanggakan dan memuaskan semua stakeholder.

#### 3. Penghargaan terhadap profesi pendidikan

Profesi pendidikan tidak akan pernah menggairahkan, selama penghargaan yang diberikan masih belum menjanjikan dan memberikan prestisius bagi siapapun yang terlibat dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, baik secara material maupun non-material, perlu terus diupayakan peningkatan penghargaan bagi profesi pendidikan.

4. Mayoritas tenaga kependidikan belum menunjukkan keprofesionalan yang membanggakan.

Tidaklah dapat dipungkiri bahwa kebijakan pendidikan belum dapat diwujudkan secara optimal, karena mayoritas tenaga kependidikan masih menunjukkan tingkat kualifikasi dan kompetensi masih berada di bawah kualifikasi dan kompetensi minimal.

#### 5. Kepedulian masyarakat bisnis dan industri yang masih rendah.

Implementasi kebijakan pendidikan nampaknya tidak bisa lepas dari kepedulian masyarakat bisnis dan industri yang masih rendah terhadap penyelenggaraan pendidikan. Mereka belum sepenuhnya menunjukkan dukungannya baik berupa dukungan material yang memadai, maupun menyiapkan space untuk tempat melakukan praktek, atau mengirimkan tenaga ahlinya ke tempat pendidikan.

### **F. Implikasi bagi Organisasi Masa Islam**

Untuk dapat membangun generasi Islam yang cerdas dan peduli bangsa, ormas Islam seharusnya ormas dan orpol politi ikut ambil peran penting dalam membangun pendidikan bangsa. Selain dari itu ormas dan orpol Islam perlu menjadikan pendidikan sebagai panglimanya dalam membangun ummat dan berjihad. Akhirnya yang sangat diharapkan bahwa semua komponen ormas dan orpol Islam dengan segala levelnya, perlu berpartisipasi aktif dan langsung dalam berkontribusi terhadap pembenahan sistem pendidikan nasional, baik dalam mengembangkamn kebijakan, implementasi, sampai pada memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan nasional.

## **F. Penutup**

Demikian beberapa pokok pikiran yang dapat disampaikan dalam sarasehan ini, semoga dapat dijadikan bahan refleksi untuk membangun ummat Islam menuju pembentukan insan yang lebih bermartabat. Tentu saja yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita dapat menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama dalam mengantarkan ummat Islam menjadi hamba yang selalu taat kepada Ilaahi Rabbi, dan menjadi khalifah di atas bumi yang mampu menghadirkan kesejahteraan dan kedamaian. Amiiin.

## **G. Daftar Pustaka**

Jalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. Ed. (2001), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita.

Tilaar, H.A.R. (1998), *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional: Dalam Perspektif Abad 21*, Magelang: Penerbit Tera Indonesia

Tilaar, H.A.R. (2000), *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Wahab, Rochmat, (2003), *Mencermati RUUSPN dikaitkan dengan Masa Depan Bangsa*, (paper), Yogyakarta: